ABSTRAK

Kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Proses ini melibatkan analisis mendalam mengenai apakah tujuan kebijakan telah tercapai, apakah sumber daya yang digunakan telah dioptimalkan, dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta perkembangan ekonomi daerah. **Tujuan penelitian** untuk mengidentifikasi Kurangnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait dan untuk mengidentifikasi keterlibatan partisipasi masyarakat disekitar danau Limboto. **Desain penelitian** Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Informan yang akan digunakan seperti Pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS), Dan Masyarakat Lokal yang berpartisipasi dalam penelitian ini. **Hasil penelitian Hasil** penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kebijakan ini belum mencapai tujuan yang diharapkan, dengan tantangan utama seperti ketidaktepatan kebijakan, pemerataan manfaat yang belum optimal, serta rendahnya responsivitas, efisiensi, dan efektivitas implementasi. **Kesimpulan** Kebijakan pembangunan di Danau Limboto menunjukkan progres, namun masih menghadapi tantangan dalam koordinasi, implementasi, dan pemerataan manfaat, sehingga perlu peningkatan pada indikator efektivitas dan responsivitas. **Saran** Pemerintah perlu meningkatkan ketepatan, pemerataan, responsivitas, efisiensi, dan efektivitas kebijakan dengan fokus pada area kritis, koordinasi, serta pengawasan optimal masyarakat.

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur,Danau Limboto, Kebijakan, ketepatan, pemerataan, responsivitas, efisiensi, dan efektivitas